



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN
PADA SITUASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan perekonomian serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan serta pengendalian penularan *Corona Virus Desease* 2019, perlu adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi pandemi Covid-19 di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang menjadi arah dan dasar dalam adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan

L

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stablitas Sistem

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Medukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6514);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang

- Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;
 21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN PADA SITUASI *CORONA VIRUS DESEASE* 2019 DI KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.

✓

3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Pagar Alam yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah Tim yang dibentuk Walikota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat di Kota Pagar Alam.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA Covid-19 adalah pedoman dalam pelaksanaan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Pagar Alam.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19;
- b. Hak dan kewajiban penduduk dalam pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19;
- c. Sumber daya penanganan Covid-19;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Sanksi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dibentuk untuk menjadi panduan dalam:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 di Kota Pagar Alam;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 di Kota Pagar Alam; dan

4

- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

BAB II
PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini diberlakukan AKB-M2PA Covid-19 di Kota Pagar Alam.
- (2) AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin social pada aktivitas luar rumah pada setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Pagar Alam.
- (3) Setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib:
 - a. menggunakan masker di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptic berbasis *alcohol 70%/handsanitizer*;
 - c. selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) di semua tempat minimal 1,5 meter sampai dengan 2 meter;
 - e. membiasakan memberikan salam tanpa melakukan kontak fisik;
 - f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 - g. bagi setiap orang yang memiliki gejala demam (suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas agar tidak beraktivitas di luar rumah dan segera menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat; dan
 - h. perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas.

✓

- (4) Setiap orang atau badan yang hendak melaksanakan kegiatan (hajatan, resepsi, kegiatan olah raga pertemuan organisasi atau kegiatan sejenisnya) yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak, wajib menyertakan surat izin keramaian dari pihak kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau lembaga pendidikan;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja atau perkantoran;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pemerintahan, organisasi swasta dan lembaga swadaya masyarakat atau penanggung jawab suatu kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.

Bagian Kedua

Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau lembaga pendidikan dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk mereapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 ayat (3).
- (2) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Lembaga pendidikan tinggi;
 - b. Lembaga pelatihan;
 - c. Lembaga penelitian;
 - d. Lembaga pembinaan; dan
 - e. Lembaga sejenisnya.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didukung dengan aktivitas pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi serta pelayanan administrasi diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota.

Pasal 6

Penanggung jawab satuan sekolah dan/atau lembaga pendidikan wajib:

- a. memastikan terlaksananya perilaku protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar dan mudah diakses oleh semua lingkungan sekolah dan/atau civitas akademika lembaga pendidikan;
- c. melaksanakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau lembaga pendidikan dengan cara:
 1. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan/atau lembaga pendidikan setiap kali setelah aktivitas di sekolah dan/atau lembaga pendidikan; dan
 2. menerapkan protokol kesehatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Kegiatan di Tempat Kerja

Pasal 7

- (1) Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pelaksanaan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.

- (3) Pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2);
 - b. melaksanakan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja secara berkala dengan cara:
 - 1) membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - 2) melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja;
 - 3) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas norma atau sakit;
 - 4) mengatur jumlah pekerja dan jarak antrian masuk ke tempat kerja dengan pemberian tanda di lantai;
 - 5) pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - 6) pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pekerja yang melayani pelanggan;
 - 7) menyarankan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta yang tidak terkontrol dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan pembatasan kegiatan di tempat kerja dan/atau *work from home* (WFH), antara lain:
 - a) penderita tekanan darah tinggi;
 - b) pengidap penyakit jantung;
 - c) penderita diabetes;
 - d) penderita penyakit paru-paru;
 - e) penderita kanker;
 - f) ibu hamil; dan
 - g) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - 8) menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar, proporsional dan mudah diakses pada tempat kerja;

L

- 9) penyediaan dan pengaturan ruangan kerja/rapat yang memperhatikan ventilasi udara dengan baik, sirkulasi dengan udara luar, rutin melakukan pembersihan filter AC serta pengaturan posisi duduk sesuai jarak aman; dan
- 10) melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Covid-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.

Bagian Keempat
Kegiatan di Rumah Makan

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis wajib:
 - a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2);
 - b. mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrian paling sedikit 1,5 – 2 meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan secara berkala minimal 2-3 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan yang sesuai;
 - g. menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;

L

- i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah, tutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan serta kesehatan kerja;
 - j. tidak menerapkan sistem prasmanan, apabila menerapkan prasmanan agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dan menggunakan atribut sesuai huruf (i);
 - k. mengupayakan pembayaran non tunai dan/atau pelayanan dan pemesanan makanan dan minuman secara *online* (*delivery service/drive thru*).
- (2) Penanggung jawab hotel wajib melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel.
- (3) Pemilik dan/atau penyedia jasa, serta pimpinan tempat kerja konstruksi wajib :
- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di kawasan proyek;
 - b. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
 - c. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Bagian Kelima

Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9

Kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 10

Pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah wajib:

- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
- b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah secara berkala sebelum dan sesudah kegiatan ibadah;
- c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;

2

- d. menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar atau handsanitizer di pintu masuk;
- e. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terhadap AC, lakukan pembersihan filter secara berkala;
- f. tidak menggunakan karpet pada lantai rumah ibadah;
- g. menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk;
- h. memberi tanda pembatas jarak di lantai/kursi;
- i. melakukan pengaturan jumlah orang di dalam rumah ibadah dalam kurun waktu yang bersamaan;
- j. menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan;
- k. menganjurkan masyarakat yang tergolong anak-anak, usia lanjut, dan yang memiliki penyakit penyerta untuk beribadah di rumah masing-masing;
- l. memasang media komunikasi tentang himbuan penerapan protokol kesehatan dan/atau sosialisasi kepada jamaah; dan
- m. memastikan setiap orang/jemaah membawa perlengkapan ibadah sendiri seperti sajadah, mukena dan perlengkapan lainnya.

Bagian Keenam

Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 11

- (1) Kegiatan di tempat atmelakukan disinfeksiau fasilitas umum dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (2).
- (2) Pengelolaan tempat atau fasilitas umum wajib :
 - a. membersihkan tempat atau fasilitas umum dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, perangkat tempat atau fasilitas umum;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar atau *handsanitizer* di pintu masuk;
 - d. mengatur waktu kunjungan dan membatasi jumlah orang paling banyak 50% dari kapasitas tempat/fasilitas umum;

- e. memberi peringatan untuk berbagi ruang, tidak meludah dan memastikan membuang limbah yang tepat;
- f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke ruangan fasilitas umum. Jika terhadap AC, lakukan pembersihan filter secara berkala;
- g. mengoptimalkan ruangan terbuka untuk tempat penjualan atau transaksi; dan
- h. memasang media komunikasi tentang himbauan penerapan protokol kesehatan dan/atau sosialisasi kepada pengunjung.

Pasal 12

Pemilik, pengelola, penanggung jawab dan satuan pengamanan pasar, pertokoan, swalayan wajib :

- a. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
- b. menerapkan aturan jarak fisik pada setiap gerai, took, antrian dan semua fasilitas lainnya antara individu di semua ruang publik;
- c. menetapkan jumlah maksimum orang yang bias memasuki tempat aktivitas perdagangan dan fasilitas lainnya;
- d. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan; dan
- e. membentuk tim pengawas, yang secara terus menerus mengawasi aktivitas di lingkungan objek masing-masing.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 13

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Penanggung jawab kegiatan Sosial dan budaya wajib :
 - a. memastikan terlaksananya penerapan protocol kesehatan sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 ayat (2); dan

- b. melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat dilaksanakannya kegiatan sosial dan budaya dengan cara:
1. memastikan kebersihan tempat atau lokasi kegiatan dan lingkungan sekitarnya;
 2. meminta penyedia tempat atau lokasi kegiatan untuk melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat yang disediakan untuk kegiatan sosial dan budaya sebelum dan setelah kegiatan;
 3. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke ruangan fasilitas umum, jika menggunakan AC agar dilakukan pembersihan filter secara berkala pada saat melakukan kegiatan di dalam gedung;
 4. membatasi jumlah peserta kegiatan paling banyak 50% dari kapasitas ruangan/tempat kegiatan;
 5. memasang media komunikasi tentang himbauan penerapan protokol kesehatan dan/atau sosialisasi pencegahan Covid-19; dan
 6. mengatur tata letak penempatan peserta, jalur keluar masuk peserta untuk memastikan jaga jarak aman.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan :
- a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik;
 - e. budaya;
 - f. khitan;
 - g. pernikahan; dan
 - h. pemakaman dan/atau takziah kematian.

Bagian Kedelapan
Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan
Orang dan Barang

Pasal 14

- (1) Penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan
- (2) Penanggung jawab, penyedia dan/atau pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib:
 - a. memastikan terlaksananya perilaku protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan
 - b. melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada moda transportasi dengan cara:
 1. membersihkan moda transportasi;
 2. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan paling sedikit 3 kali sehari;
 3. menggunakan masker dan/atau sarung tangan pada saat mengendarai atau naik moda transportasi;
 4. membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas angkut moda transportasi;
 5. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara:
 - a) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 - b) pada pintu masuk beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1,5 meter;
 - c) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - d) jika memungkinkan pemesanan tiket dilakukan secara *online*; dan
 - e) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah.

6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk di Kota Pagar Alam mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kota;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi public seputar Covid-19;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan Covid-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk di Kota Pagar Alam mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan seperti dimaksud pasal 4 ayat (2);
 - b. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam rangka penyelidikan epidemiologi (*contact tracking*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - c. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan; dan

- d. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Covid-19, Pemerintah Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. jasa dan/atau dukungan lain; dan
 - e. pembiayaan.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota melalui Gugus Tugas Kota melakukan pembinaan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 kepada

Gugus Tugas Kecamatan, Kelurahan sampai ke Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

- (2) Pembinaan dilaksanakan secara untuk memastikan berfungsinya gugus tugas sampai ketinggian kelurahan/RW/RT.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap AKB-M2PA Covid-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota sesuai kewenangan dan tanggung jawab melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kriteria :
 - a. pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sesuai dengan Peraturan Walikota;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 Pemerintah Kota, Swasta, Akademisi, masyarakat dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19.
- (2) Pemantauan pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan AKB-M2PA Covid-19 pada situasi Covid-19 dikenakan sanksi administratif dan daya paksa polisional.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administrasi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - h. daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. membersihkan fasilitas umum;
 2. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 3. melakukan push-up; dan/atau
 4. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota, instansi teknis dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 23

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau lembaga pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota bersama instansi teknis.

L

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; dan
 - b. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol kesehatan covid-19, pimpinan tempat kerja dikenakan denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait.
- (4) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif.

Pasal 25

- (1) Setiap penanggung jawab restoran /rumah makan/usaha sejenis yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penerapan protokol kesehatan covid-19; dan
 - b. dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis dan denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota dengan pendampingan dari perenagkat daerah terkait.

Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab hotel/penginapan/usaha sejenis yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; dan
 - b. dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis dan denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kota dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel; dan
 - b. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota dengan pendampingan dari Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Penyegelan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis dan denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegelan di kawasan proyek.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pananaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota dengan pendampingan dari Perangkat daerah Terkait
- (3) Penyegehan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif.

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab rumah ibadah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota.

Pasal 30

- (1) Setiap pengelola tempat atau fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. administratif berupa teguran tertulis;
 - b. sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan
 - c. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. penghentian atau pembubaran kegiatan yang sedang berlangsung; dan
 - b. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh instansi berwenang.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang/pribadi yang berpenumpang lebih dari 1 (satu) orang dan tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengemudi dan penumpang kendaraan yang berasal dari satu keluarga dengan alamat yang sama.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.

- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker dikenakan sanksi denda administratif :
- a. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengemudi dan penumpang sepeda motor yang berasal dari satu keluarga dengan alamat yang sama.
- (3) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi:
- a. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika penumpang satu alamat/tempat tinggal dengan pengemudi sepeda motor yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

h

- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan Kota dan Kepolisian.
- (6) Dalam melakukan tindakan penderekan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan sepeda motor beserta muatannya.
- (7) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi sepeda motor dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (8) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemilik/pengemudi sepeda motor tidak mengambil sepeda motor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan. Dikenakan sanksi berupa:
 - a. menurunkan sejumlah penumpang yang melebihi pembatasan; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - d. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota.
- (3) Dalam melakukan tindakan penderekan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (4) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (5) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang dan/atau Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengemudikan dan mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan Pasal 34 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan kepada kas daerah melalui Bank SumselBabel Cabang Kota Pagar Alam, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27,

L

Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 SKDA diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota.

- b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28, SKDA diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
 - c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, SKDA diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank SumselBabel Cabang Kota Pagar Alam oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- a. untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota yang melakukan penindakan;
 - b. untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota yang melakukan penindakan; dan
 - c. untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota yang melakukan penindakan.

~

h

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 27 Agustus 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 30